Pembatasan BBM : Dari Pencitraan Hingga Liberalisasi

Zoel Dirga Dinhi

(Dipublikasikan di rubrik Opini Harian Fajar dan Fajar Online Edisi Kamis, 17 Februari 2011)

Jika tak ada aral melintang, kebijakan pembatasan subsidi BBM segera diputuskan untuk diterapkan oleh pemerintah April tahun ini. BBM bersubsidi (premium) kelak hanya diperuntukkan bagi kendaraan pelat kuning dan sepeda motor. Kebijakan yang tidak matang ini diambil sebagai upaya penyesuaian subsidi yang dianggap melebihi volume kuota anggaran sehingga membebani APBN.

Masih membekas dalam ingatan masyarakat tentang kebijakan penurunan harga BBM, bahkan hingga tiga kali pada tahun 2008 lalu, meski sebelumnya pemerintah telah menaikkan harga BBM beberapa kali. Penguasa saat itu seakan menghipnotis dengan sering kali menampilkan diri agar terciptakan sebagai pahlawan di layar kaca, tentu saja di hadapan rakyat, sebagai pemilik legitimasi politik saat pemilu setahun setelahnya -karena seakan legitimasi itu hanya hadir pada saat pemilu-. Nampaknya upaya itu berhasil mengelabui mereka setelah pemerintah yang sama kembali bertakhta.

Kini, upaya itu kembali akan ditempuh dengan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi. Dengan memanfaatkan kesan “membela” masyarakat menengah ke bawah, penguasa akan kembali membodohi rakyatnya dengan tampil kembali sebagai pahlawan. Di masa kekuasaannya yang kedua, pemerintah masih saja memprioritaskan kebijakan ekonomi yang diambil dengan mendahulukan pertimbangan politik pencitraan daripada rasionalitas ekonominya, bahkan sarat dengan nuansa liberalisasi, yang masih senada dengan denyut kapitalisme.

Pencitraan seakan menjadi syarat pasti dalam sebuah pemerintahan bercorak demokrasi. Karena legitimasi kekuasaan dan kebenaran di anggap berada di tangan rakyat -yang

pemahamannya terbatas dan mudah dikelabui -. Belum lagi upaya “memperhalus penamaan” kebijakan bercorak liberalisasi sebagai bagian dari upaya menjaga citra dihadapan rakyat. Pembatasan BBM diopiniikan sebagai pengaturan, utang luar negeri dicitrakan sebagai bantuan. Menjual aset negara (privatisasi) “diluruskan” sebagai pemberdayaan BUMN.

Sepintas, memang kebijakan ini sangatlah populis secara politis. Mengingat tidak ada kenaikan harga pada BBM bersubsidi. Namun, jika ditelisik lebih jauh, kebijakan ini memunculkan disparitas harga yang sangat lebar. Premium yang dibanderol seharga Rp 4.500 per liter berselisih sangat jauh dengan harga pertamax yang berharga Rp 7.950. Tentunya ini akan memunculkan masalah karena BBM mobil berpelat hitam seolah naik harga 76 persen. Belum lagi potensi munculnya distorsi dan permasalahan lainnya seperti pasar gelap dan ketidaksiapan infrastruktur di semua wilayah sehingga muncul ketidakadilan. Agenda Abadi Dampak sistemik dari kebijakan ini pun tak dapat terhindarkan. Karena BBM merupakan komoditas dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat, kenaikan harganya mampu memicu inflasi.

Dari kajian yang dilansir Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan, potensi penambahan inflasi akibat kebijakan pembatasan subsidi 0,5 persen – 0,87 persen sehingga laju inflasi yang mungkin terjadi akhir tahun adalah 6,1 persen – 6,62 persen. Ini berarti daya beli masyarakat yang berpenghasilan tetap setahun ini harus turun sebesar laju inflasi tersebut. Secara otomatis, potensi bertambahnya angka kemiskinan terbuka lebar. Selain itu, alasan lainnya mengapa kita harus menolak kebijakan ini karena Indonesia memiliki cadangan energi, termasuk migas yang sangat besar.

Berdasarkan data Ditjen Migas Kementrian ESDM, jumlah “cadangan terbukti” minyak bumi Indonesia sebesar 3.747 juta barel dan “cadangan potensial” sebesar 4.471 juta barel sehingga total sebesar 8,22 miliar barel. Namun sayang, sebagian besar sudah dijatah untuk

asing. Data yang diungkapkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyatakan 84 persen produksi migas nasional dikuasai asing dan luas lahan konsesi migas yang diberikan pemerintah kepada investor mencapai 49,65 persen. Perlu diketahui pula bahwa pembatasan BBM bersubsidi dalam jangka panjang akan menguntungkan perusahaan minyak asing yang memiliki SPBU seperti Shell, Total Oil, Petronas, dan lainnya. Terbukti dengan respon positif yang diungkapkan oleh mereka di media.

Dengan adanya pembatasan BBM seperti itu, pemerintah telah membuka ruang persaingan antara Pertamina dan perusahaan asing dalam bisnis hilir migas karena harga yang sudah sangat kompetitif. Arah politik-ekonomi yang telah dan akan dijalankan pemerintah saat ini, tentunya sangat terkait dengan mental budak penguasa yang manut terhadap paket ekonomi neoliberal yang telah lama diagendakan oleh kaum neoliberal untuk menindas negara berkembang, termasuk Indonesia.

Paket ekonomi neoliberal yang dikenal dengan konsensus Washington ini dirancang pada pertemuan IMF, Bank Dunia, dan US Treasury pada tahun 1989. Secara garis besar, kebijakan ekonomi neoliberal memiliki agenda yang sangat mudah diidentifikasi, yang meliputi: Pertama, stabilitas makroekonomi dan disiplin anggaran dengan memprioritaskan pemangkasan berbagai subsidi. Kedua, liberalisasi perdagangan, industri, dan investasi, serta ketiga, privatisasi dengan menjual aset negara. Tentunya ini akan menjadi agenda abadi pemerintah selama masih tetap mengadopsi sistem yang berideologi kapitalisme-liberal.

Kesimpulannya, agenda pembatasan subsidi BBM merupakan langkah bertahap Pemerintah untuk menghapus subsidi BBM sebagai komitmen terhadap Konsensus Washington. Subsidi BBM yg selama ini dianggap membebani APBN dan sering salah sasaran merupakan pernyataan "menyesatkan". Menghadapi kebijakan zalim penguasa yang hanya mengabdikan untuk

kepentingan penjajah ini maka hanya ada dua cara, yaitu berdoa sebagaimana doa Nabi saw yang diriwayatkan Muslim “Ya Allah, siapa saja yang menjadi pengatur urusan umatku kemudian ia memberatkan mereka, maka beratkanlah ia”. Serta mengupayakan penyadaran masyarakat tentang keberingasan sistem kapitalis-liberal ini dan menggantinya dengan sistem pengelolaan berbasis syariah yang jauh lebih manusiawi. *Wallahu a'lam bish-shawab.*